

DAMPAK PERANG RUSIA - UKRAINA TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA INDONESIA DAN RUSIA

Agung Udayana¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

The Russia-Ukraine war has disrupted global stability, affecting many countries, including Indonesia, due to Europe's reliance on Russian energy. This study explores the war's background and its impact on Indonesia-Russia diplomatic relations. Using qualitative methods, data were collected through interviews, literature review, and documentation, analyzed with Soft Power Theory and First Track Diplomacy. The findings indicate that the conflict began in 2013 when Ukraine's president rejected an EU trade deal. Despite condemning the war, Indonesia's relations with Russia remained strong, with Indonesia maintaining neutrality and emphasizing its independent foreign policy.

Keywords: Impact, War, Diplomatic Relations

ABSTRAK

Perang Rusia-Ukraina telah mengganggu stabilitas global dan mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia, karena ketergantungan Eropa pada energi dari Rusia. Penelitian ini mengeksplorasi latar belakang perang serta dampaknya terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia. Menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, studi literatur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan Teori Soft Power dan Konsep First Track Diplomacy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini bermula pada tahun 2013 ketika Presiden Ukraina menolak perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa. Meskipun Indonesia mengutuk perang, hubungannya dengan Rusia tetap kuat, dengan Indonesia mempertahankan netralitas dan menekankan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif.

Kata kunci: Dampak, Perang, Hubungan Diplomatik

PENDAHULUAN

Perang merupakan peristiwa yang mewarnai sejarah kehidupan dan peradaban manusia di muka bumi ini sepanjang masa. Peristiwa perang biasanya terjadi dengan alasan adanya perselisihan antara dua belah pihak yang tidak mau mengalah satu sama lain yang saling mempertahankan suatu kepentingan, baik itu kepentingan politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya dengan pertimbangan pihak masing-masing. Perang lahir dari hubungan- hubungan yang ada di antara manusia itu sendiri dan suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh siapa pun. Namun, dalam keadaan tertentu peperangan tentu saja dapat terjadi karena situasi politik maupun karena keegoisan pihak tertentu, dimana masing-masing pihak berusaha untuk memaksakan kehendaknya, bahkan pada zaman sekarang kita sering mendengar peperangan terjadi dengan dalih untuk membela keadilan dan menciptakan kedamaian dalam kehidupan di dunia. Timbulnya perang selalu menyisakan duka bagi mereka yang terpaksa kehilangan sanak keluarga karena menjadi korban dari keganasan perang, termasuk kerugian materi dan finansial yang tak ternilai. Perang juga akan sangat berdampak pada situasi negara secara keseluruhan, karena

perang tentu menggunakan segala sumber daya yang dimiliki negara secara total.

Menurut Oppenheim yang dikutip oleh Djatikoesoemo (1956, hlm 1) : *“War is contention between two or more state through their armed forced, for the purpose of overpowering each other and imposing such condition of peace as the victor please”*. Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa perang merupakan pertikaian antara dua negara atau lebih melalui angkatan bersenjata yang bertujuan saling mengalahkan dan memberikan keadaan damai sesuai keinginan pemenangnya. Meningkatnya sengketa bersenjata atau perang yang terjadi di kalangan masyarakat internasional belakangan ini membuat masalah perang tidak bisa dianggap masalah kecil.

Untuk itu masyarakat internasional harus menghadapi masalah ini dengan serius agar tidak menimbulkan kerugian yang makin besar dan mengakibatkan hancurnya pola hubungan sosial antar pihak atau golongan dimasa yang akan datang. Mengingat dewasa ini sengketa bersenjata atau perang dilakukan dengan cara yang semakin lama semakin tidak manusiawi dan merupakan malapetaka yang besar terhadap kedamaian dunia, maka tidaklah mengherankan apabila umat manusia berusaha untuk menghapus perang, atau setidaknya memperkecil kemungkinan terjadinya perang. Adanya kesadaran manusia untuk meminimalkan kerugian dari perang atau sengketa bersenjata itu maka disepakatilah ketentuan-ketentuan mengenai perang yang baru-baru ini disebut hukum humaniter. Hukum humaniter internasional yang sebelumnya disebut dengan hukum perang merupakan bagian dari hukum internasional yang pertama kali dimodifikasi. Maka dapat dikatakan hukum perang merupakan induk atau asal muasalnya hukum internasional. Hukum perang mengatur mengenai cara dilakukannya perang, alat yang diperbolehkan dalam perang serta perlindungan terhadap orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut.

Perang telah menebarkan kehancuran di seluruh belahan dunia karena berdampak pada hubungan antar negara dan bangsa. Di sisi lain, perang dianggap sebagai pertempuran yang merugikan banyak pihak, seperti kasus yang sedang terjadi di Ukraina sejak November 2013. Pada saat itu, Presiden Ukraina Viktor Yanukovich batal melakukan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa dan memutuskan untuk menerima utang dari Rusia sebanyak 15 miliar dolar AS. Rusia memberikan utang tersebut sebagai bentuk “kompensasi” karena Ukraina batal melakukan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa. Akibat dari batalnya kesepakatan tersebut, masyarakat wilayah barat yang menginginkan agar Ukraina mendekatkan diri dengan Eropa Barat dan kaum nasionalis, kemudian menggelar demonstrasi (Sihombing, 2014, hlm. 5). Krisis Ukraina memuncak ketika tergulingnya Viktor Yanukovich dari Presiden Ukraina karena pilihannya untuk tetap bersekutu dengan Rusia dibanding dengan Uni Eropa yang justru ditentang mayoritas rakyat Ukraina sendiri.

Pada tahun 1991 Ukraina merdeka ketika Unisoviet pecah, namun masih terjadi krisis, Ukraina dikenal oleh dunia internasional sebagai negara “bandel” terhadap Rusia, di saat Rusia yang secara geopolitik menginginkan pengaruhnya tetap tertanam di Ukraina, penduduknya sendiri seolah enggan untuk tetap dekat dengan Rusia, mereka malah condong mendekat ke Barat. Meski pada kenyataannya Ukraina tetap dikontrol oleh Rusia hingga sekarang, dan baru-baru ini rakyat Ukraina berani untuk lepas dari Rusia. Puncak dari krisis Ukraina sebenarnya ketika Ukraina dan Rusia berebut wilayah Crimea, di satu sisi Ukraina ingin Crimea tetap menjadi bagian wilayah negaranya, namun di sisi lain mayoritas penduduk di Crimea sendiri ingin bergabung dengan Rusia, suatu hal yang wajar mengingat mayoritas penduduk Crimea merupakan etnis Rusia. Krisis ini sekarang meluas hingga menjadi perseteruan Uni Eropa dan Amerika Serikat yang mendukung Ukraina melawan Rusia, sehingga dari krisis yang tak kunjung selesai tersebut mengakibatkan terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina.

Perang antara negara Rusia - Ukraina merupakan perang yang terjadi akibat dari perselisihan dan sengketa yang sampai dengan sekarang belum menemukan titik temu. Perang dingin antara Rusia - Ukraina terjadi pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia melancarkan aksi invasi serangan di wilayah Ukraina Timur, Ukraina merupakan salah satu tetangganya di sebelah barat daya. Invasi ini mendadak munculnya kembali peristiwa yang telah terjadi dalam perang Rusia-Ukraina yang dimulai tahun 2014. Krisis di Ukraina adalah satu-satunya masalah internasional terpenting saat ini. Konflik tersebut melibatkan Crimea, sebuah komunitas yang didominasi secara otonom di Pegunungan Selatan yang berada di ambang kehancuran, yang memilih bergabung ke dalam federasi Rusia.

Pada tanggal 17 Maret 2014 pertempuran di Donbass dimulai ketika ada protes besar-besaran pro-Rusia, yang kemudian mulai mengambil alih gedung. Crimea saat ini berada di bawah otoritas Rusia, mereka berhasil menerobos penjaga polisi lalu masuk dan merusak orang-orang pro-Rusia meminta pemungutan suara pada pemerintahan baru dalam struktur penting. Setelah itu, pemerintah Ukraina mulai bereaksi keras dan mengirim pasukan untuk mengakhiri kekerasan. Konflik antara pemerintah Ukraina dan mayoritas pro-Rusia, yang menuntut referendum, dimulai sejak saat itu. Konflik tersebut dikenal sebagai "perang Donbass" karena terjadi di kawasan industri Donbass, yang meliputi kota Donetsk, Luhansk, dan Kharkiv di Ukraina.

Perang antara Rusia - Ukraina telah mengakibatkan lebih dari 14.000 nyawa melayang. Rusia-Ukraina mengadakan perjanjian damai yang dikenal dengan “ Kesepakatan Minsk ” pada tahun 2014 (kesepakatan Minsk I) yang banyak menimbulkan pelanggaran dan tahun 2015 (kesepakatan Minsk II) untuk menghentikan konflik, tetapi pada awal 2021 situasi kembali tidak terkendali. Ukraina mendesak Amerika Serikat untuk memperbolehkan Ukraina bersatu pada NATO. Hal ini memicu Presiden Rusia marah, dan mulai mengerahkan pasukan di dekat perbatasan Ukraina. Kemudian Amerika Serikat dan negara-negara lain menuduh Rusia mempersiapkan invasi ke Ukraina, Rusia menyangkal dalam menginvasi dan mengklaim pengiriman pasukan itu untuk latihan. Presiden Rusia mengkritik ekspansi NATO pasca 1997 sebagai ancaman terhadap keamanan negaranya seiring berkembangnya konflik ini dan menuntut Ukraina dilarang bergabung dengan NATO. Tanggal 24 Februari 2022, Dewan Federasi Rusia mengizinkan untuk menyebarkan kekuatan militer di luar perbatasan, kemudian Rusia mengirimkan pasukan.

Dengan adanya invasi Rusia ke Ukraina, maka tanggal tersebut dimulailah terjadinya perang. Operasi militer luar biasa di Ukraina Timur telah diumumkan, beberapa menit kemudian, serangan rudal dimulai di ibu kota Ukraina, Kiev. Dua jam setelah pasukan darat Rusia mulai bergerak maju ke wilayah Ukraina, dinas perbatasan Ukraina melaporkan bahwa sebuah serangan telah terjadi di pos perbatasannya dengan Rusia. Sebagai tanggapan, presiden Ukraina memberlakukan darurat militer, memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia, dan mendeklarasikan mobilisasi massa. Kritik luas di seluruh dunia terhadap invasi tersebut mengakibatkan diterapkannya sanksi dan embargo kepada pihak Rusia. Secara global perang ini menyebabkan sebuah krisis finansial dan sanksi perdagangan dengan negara lain. Yang sudah terlihat nyata dampak dari sanksi Uni Eropa terhadap Rusia adalah dimungkinkan berbagai metode di antaranya lonjakan nilai komoditas, lonjakan nilai energi, dan *Supply chain shock*. Prospek inflasi di seluruh dunia perlu diperhitungkan sebagai akibat dari konflik antara Rusia dan Ukraina, karena inilah yang sebenarnya akan terjadi mengingat tujuan awal pertarungan adalah gangguan jaringan pasokan global mengganggu proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Dengan demikian, perkembangan ekonomi global justru akan melambat dan selebihnya akan berdampak pada perlambatan investasi dan konsumsi akibat terganggunya arus barang dan jasa di dunia internasional, yang akan berdampak negatif terhadap kinerja khususnya sektor ekspor- impor. Kombinasi dari ketiga hal tersebut tentu akan membawa dampak juga bagi perekonomian Indonesia serta hubungan diplomasi antar kedua negara.

Diplomasi merupakan suatu alat yang akan membawa kepentingan negara dalam level tertentu. Dari diplomasi tersebut, sebuah negara akan menghasilkan keputusan kerja sama antar negara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Oleh sebab itu, perlu adanya penyelesaian agar negara-negara tersebut aman untuk menjadi tempat tinggal. Tujuan dari diplomasi ini adalah untuk menciptakan World peace, artinya dapat menciptakan rasa aman dan sejahtera bagi seluruh masyarakat dunia. Untuk itu perlu adanya gerakan atau tempat yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas untuk menyalurkan pendapatnya terkait dengan penyelesaian permasalahan di negara-negara yang sedang berkonflik. Melakukan sebuah diplomasi itu perlu adanya keterlibatan dari faktor lain misalnya *government* yang tentunya memiliki peran penting untuk melakukan diplomasi antar negara.

Politik luar negeri dan diplomasi Indonesia dilakukan untuk memastikan terjaminnya kepentingan nasional Indonesia, pertumbuhan nasional, pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, keamanan nasional, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik luar negeri Indonesia secara diplomatis masih tetap mengacu pada politik luar negeri bebas-aktif yang semata didasarkan pada kepentingan nasional.

Berbagai permasalahan di atas perlu dianalisis dan diteliti karena peristiwa tersebut merupakan salah satu bagian dari pertempuran yang penting dalam Perang Dunia II, khususnya di front Eropa Timur. Pertempuran antara Jerman dengan Uni Soviet di wilayah Ukraina adalah bagian dari penyerangan awal Jerman ketika hendak menguasai Uni Soviet yang merupakan salah satu pertempuran besar dan menjadi salah satu sebab kekalahan bagi pihak Jerman. Pertempuran di Ukraina merupakan bagian dari perang Jerman dengan Uni Soviet selama Perang Dunia II maka sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis serta berkaitan dengan hubungan antar negara di dunia khususnya negara Indonesia.

KERANGKA ANALITIK

Teori Perang

Di dalam sejarahnya perang sering terjadi, baik perang di dalam suatu negara ataupun perang antar negara, namun lebih nampak dalam perang antar negara, perang memang selalu menghasilkan efek kehancuran yang tidak terelakkan. Di sisi lain, beberapa pihak memanfaatkan hal tersebut yakni kerusakan dan kehancuran yang pasti terjadi dan kerugian yang didapat di masa perang serta merusak, menghancurkan berbagai macam objek ataupun material milik lawan dengan alasan bahwa itu tidak bisa dihindari.

Pengertian perang dalam sosiologi yaitu gejala yang disebabkan oleh pertentangan yang mengakibatkan disorganisasi sosial dalam aspek kemasyarakatan. Perang akan menyisakan persoalan yang berkepanjangan seperti retaknya hubungan sosial, korban jiwa dan harta, trauma, dan menghambat perkembangan kepribadian korban. Pada dasarnya, perang merupakan aksi mendominasi wilayah yang diperebutkan baik secara fisik maupun non-fisik. Zaman dahulu, perang juga dapat diartikan sebagai pertikaian bersenjata. Pada era modern sekarang ini, perang lebih mengarah ke arah teknologi dan industri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1976), perang berarti "Permusuhan antara dua negara, bangsa, agama, suku, dan lain sebagainya, sebagai tambahan, perang merupakan pertempuran bersenjata antara dua pasukan". Perang adalah perkelahian antar kelompok dimulai sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Keegan dalam Gary D. Solis (2010), mengatakan bahwa bukti tersebut ditemukan melalui suatu lukisan gua, tentang sekelompok pemanah dalam suatu konflik yang berumur 10.000 tahun yang lalu. Perang adalah perkelahian dalam skala besar, merupakan kelanjutan dari kebijakan dalam bentuk lain. Sehingga perang memiliki makna yang sangat luas baik perang dalam bentuk fisik (menggunakan kekuatan/hard/power/force) maupun non fisik (soft power).

Peperangan adalah bentuk persengketaan negara yang setara dalam hukum internasional, dimana senjata digunakan sebagai bentuk yang legal atau sah dalam melakukan perang. Pengertian perang menurut Bambang Sugiharto: "Perang adalah hal yang kompleks karena memiliki sisi positif dan negatif, unsur, definisi, serta varian." Sisi positif dan negatif

dari perang bergantung pada dampak, frekuensi, skala, perkembangan yang terjadi, dan motivasinya.

Menurut Kusumaatmadja (1968), “Perang merupakan keadaan dimana beberapa negara terlibat dalam persengketaan bersenjata, disertai suatu pernyataan niat dari salah satu pihak”. Sedangkan menurut Djatikoesoemo “Perang adalah keadaan legal yang memungkinkan dua orang atau lebih yang sederajat menjalankan persengketaan bersenjata. Michael Gelven (1994), “Perang merupakan konflik bersenjata yang nyata, luas, dan disengaja atas persoalan pemerintahan”.

Menurut Oppenheim yang dikutip oleh Djatikoesoemo dalam bukunya (1956, hlm 1), “*War is contention between two or more states through their armed forces, for the purpose of overpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases*” (Perang adalah sengketa antara dua negara atau lebih melalui kekuatan senjata mereka, dengan maksud menguasai lawan dan membangun kondisi perdamaian seperti yang diinginkan oleh pemenang). Menurut Starke (2008), perang, dalam pengertian umum, adalah “Suatu pertandingan (contest) antara dua negara atau lebih, terutama dengan angkatan bersenjata mereka, dan tujuan akhir dari setiap kontestan adalah untuk mengalahkan kontestan-kontestan lain, dan membebaskan syarat- syarat perdamaian”.

Karl Von Clausewitz (1832), mendefinisikan “Perang sebagai perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menundukkan lawannya guna memenuhi kehendaknya”. Dalam definisi tersebut terdapat dua aspek penting mengenai perang yaitu, perang dilakukan dalam skala besar, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perang memiliki tujuan untuk menundukkan dan memaksakan persyaratan- persyaratan tertentu. Berdasarkan beberapa definisi diatas, secara umum perang lazimnya dianggap sebagai konflik bersenjata yang terjadi diantara negara-negara. Jadi, dapat dikatakan bahwa perang adalah salah satu wujud dari konflik bersenjata (*armed conflict*).

Dari penjelasan di atas dibahas tentang konflik bersenjata, maka untuk menghilangkan dan meminimalisir kerancuan, penulis mencoba menguraikan mengenai apa itu konflik bersenjata. Konflik bersenjata dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni konflik bersenjata yang bersifat internasional dan non-internasional (internal atau domestik). Konflik bersenjata dikatakan bersifat internasional apabila pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut adalah negara berhadapan dengan negara. Konflik bersenjata dikategorikan sebagai konflik non-internasional bila yang berhadapan dalam konflik adalah setidaknya salah-satu adalah kelompok bersenjata bukan negara. Konflik bersenjata internasional dibedakan lagi menjadi perang dan bukan perang. Konflik bersenjata internasional bukan perang, terjadi saat dua atau lebih negara terlibat dalam penggunaan kekerasan senjata satu sama lain, namun skala penggunaan kekerasan senjata itu tidak bersifat luas, dan tujuannya pun bukan untuk mengalahkan musuh secara total dengan memaksakan syarat-syarat perdamaian.

Menurut Pietro Verri (1992), istilah konflik bersenjata (*armed conflict*) merupakan ungkapan umum yang mencakup segala bentuk konfrontasi antara beberapa pihak, yaitu:

1. Dua negara atau lebih;
2. Suatu negara dengan suatu entitas non negara;
3. Suatu negara dan suatu faksi pemberontak; atau

4. Dua kelompok etnis yang berada di dalam suatu negara.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan, perang adalah aksi gerilya disertai kekerasan, pendudukan, ancaman, teror, dan penaklukan untuk mengalahkan lawan. Perang juga bisa didefinisikan sebagai gejala yang terjadi di antara komunitas politik.

Menurut Thomas Lindemann, ada 4 hal yang memotivasi terjadinya perang (Lindemann, 2024), antara lain ;

1. *Prestige* (Kebanggaan)
2. *Antipathy* (antipati) yang merupakan perbedaan identitas yang sangat mencolok.
3. *Universal dignity* (harga diri universal/kehormatan) yaitu perang yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap standar universal kedaulatan negara.
4. *Particular dignity* (harga diri tertentu).

Teori Diplomasi

Diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Biasanya, orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus. Diplomasi yang paling sederhana dan tertua adalah diplomasi bilateral antara dua pihak dan biasanya merupakan misi dari kedutaan besar dan kunjungan kenegaraan. Contohnya adalah persetujuan perdagangan bebas Kanada-Amerika yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan Kanada. Jenis lainnya adalah diplomasi multilateral yang melibatkan banyak pihak dan bisa ditelusuri dari Kongres Wina. PBB adalah salah satu institusi diplomasi multilateral. Beberapa diplomasi multilateral berlangsung antara negara-negara yang berdekatan atau dalam satu region, sehingga diplomasi ini dikenal sebagai diplomasi regional.

Diplomasi telah menjadi salah satu bagian yang vital dalam kehidupan negara dan merupakan sarana utama guna menangani masalah-masalah internasional agar dapat dicapai suatu perdamaian dunia. Dengan sarana diplomasi itu pemerintah menjalankannya dalam rangka mencapai tujuannya dan mendapatkan dukungan dari prinsip-prinsip yang dianutnya. Diplomasi yang merupakan proses politik itu terutama dimaksudkan untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lainnya. Sebagai sebuah proses politik, diplomasi juga merupakan bagian dari usaha saling mempengaruhi yang sifatnya sangat luas dan berbelit-belit dalam kegiatan internasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi internasional untuk meningkatkan sasarannya melalui saluran diplomatik. Secara etimologis, kata “diplomasi” berasal dari kata Yunani “diploun” berarti melipat. Hal ini merujuk kepada fenomena yang ada pada masa kekaisaran Romawi dimana semua paspor yang melewati jalan negara dan surat-surat jalan dicetak pada piringan logam doble, dilipat dan dijahit menjadi satu. Surat jalan logam ini disebut “diplomas”.

Dalam prakteknya, diplomasi harus dibedakan dengan politik luar negeri, oleh karena itu diperlukan adanya batasan diantara kedua konsep tersebut. Dimana, “diplomasi” bukanlah merupakan suatu kebijakan, tetapi merupakan lembaga untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Namun diplomasi dan kebijakan keduanya saling melengkapi

karena seseorang tidak akan dapat bertindak tanpa kerjasama satu sama lain. Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri, tetapi keduanya bersama-sama merupakan kebijakan eksekutif untuk menetapkan strategi, diplomasi dan taktik. Disatu pihak, kebijakan atau politik luar negeri memiliki perhatian pada substansi dan kandungan dari hubungan luar negeri, dan dipihak lain, perhatian diplomasi dipusatkan kepada metodologi untuk melaksanakan kebijakan luar negeri. Diplomasi merupakan cara-cara yang dilakukan dalam hubungan internasional melalui perundingan, cara dimana dilaksanakan oleh para duta besar, yang merupakan pekerjaan atau seni dari diplomat. Diplomasi merupakan suatu cara berkomunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktek-praktek negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional. Dengan demikian diplomasi juga merupakan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuannya dan memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip yang diambilnya (Setiawan, 2016).

Jika berbicara mengenai tugas dari diplomasi sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tugas para pelakunya maupun institusinya, terutama adalah para diplomat dengan perwakilan diplomatiknya yang berada di suatu negara sebagaimana yang tercantum dalam “Konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik”. Menurut Hans J. Morgenthau (1985), tugas diplomasi dibagi dalam empat pokok. Pertama, diplomasi harus menentukan tujuan berdasarkan kekuatan/kekuasaan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu negara yang ingin menciptakan tujuan-tujuan yang belum dicapai haruslah berhadapan dengan suatu resiko untuk perang. Karena itu diperlukan suksesnya diplomasi untuk mencoba mendapatkan tujuannya tersebut sesuai dengan kekuatannya. Kedua, disamping melakukan penilaian tentang tujuan-tujuannya dan kekuatannya sendiri secara actual dan potensial, diplomasi juga harus mengadakan penilaian tujuan dan kekuatan dari negara-negara lainnya.

Dalam hal ini, suatu negara haruslah menghadapi resiko akan terjadinya peperangan apabila diplomasi yang dilakukannya itu salah dalam menilai mengenai tujuan dan kekuatan dari negara-negara lain. Ketiga, diplomasi haruslah menentukan dalam hal perbedaan yang ada pada tujuan-tujuan tersebut kompatible satu sama lain. Diplomasi harus dilihat kepentingan negaranya sendiri dengan negara lain untuk mencapai kecocokan. Jika jawabannya “tidak” maka harus dicari jalan keluar untuk merujukan kepentingan tersebut. Keempat, diplomasi harus menjadi sarana dengan menggunakan cara-cara yang pantas dan sesuai, seperti kompromi, bujukan, bahkan kadang-kadang ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan. Pengertian tentang tugas diplomasi, tidak lain hal itu menyangkut pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di dalam melakukan diplomasi yang menurut R.P Barston (2013), dapat digolongkan dalam enam bidang yang cukup luas. Bidang pertama yang dianggap sangat penting adalah mengenai keterwakilan yang meliputi keterwakilan murni termasuk penyerahan surat-surat kepercayaan, protokol dan keikutsertaan di dalam kegiatan-kegiatan diplomatik yang dilakukan di ibu kota atau lembaga-lembaga pemerintahan setempat (Setiawan, 2016).

Jika dilihat kembali, sebenarnya aspek yang paling penting adalah keterwakilan yang bersifat substantif, yaitu mencakup bukan saja usaha- usaha untuk menjelaskan dan

mempertahankan kebijakan nasional yang disalurkan melalui perwakilan-perwakilan diplomatik dan saluran-saluran luar lainnya, tetapi juga untuk melaksanakan perundingan dan penafsiran tentang kebijakan dalam dan luar negeri dari pemerintah negara penerima. Tugas untuk melakukan tindakan sebagai tempat untuk mendengarkan atau memantau merupakan kelanjutan dari keterwakilan yang bersifat substantif. Jika berfungsi dengan benar maka, kedutaan besar sebuah negara harus dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kunci, pola-pola dalam dan luar negeri yang muncul termasuk implikasinya agar dapat memberikan informasi terkait dengan saran maupun peringatan kepada negara pengirim. Meletakan dasar kerja atau mempersiapkan dasar bagi suatu kebijakan atau prakarsa-prakarsa baru.

Dalam hal terjadinya konflik bilateral yang meluas dan potensial maka diplomasi diupayakan untuk mengurangi ketegangan atau melicinkan roda dalam rangka memelihara hubungan secara bilateral maupun multilateral. Untuk memperluas tujuan-tujuan tersebut, diplomasi juga berfungsi untuk menyumbang kepada perubahan-perubahan yang aman dan tertib. Pada tingkat lebih umum, tugas penting dari diplomasi adalah untuk menciptakan, merumuskan, dan mengadakan perubahan-perubahan terhadap peraturan internasional yang luas mengenai jenis peraturan dan norma-norma yang dapat memberikan bentuk dalam sistem internasional.

Teori Politik Luar Negeri.

Untuk mempelajari perilaku sebuah negara dalam konteks hubungan internasional KJ. Holsti memberikan penjelasan yang menarik. Holsti menjelaskan bahwa ketika sebuah negara berinteraksi maka disebutnya sebagai politik internasional. Namun ketika sebuah negara melakukan kebijakan terhadap negara lain atau lingkungan internasional maka itulah porsi studi politik luar negeri. Penjelasan ini memberikan gambaran bahwa studi politik luar negeri lebih dekat studi kebijakan atau studi aksi sebuah negara terhadap lingkungannya dan juga respons negara itu terhadap lingkungannya baik berupa negara atau unit analisis lainnya, baik dalam bentuk kelompok politik, bisnis atau organisasi non pemerintah.

Politik luar negeri menurut pendapat Sumpena Prawirasaputra¹ adalah “Kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar negerinya. Ia merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan khususnya tujuan untuk sesuatu kurun waktu yang sedang dihadapi, lazim disebut kepentingan nasional. Pada hakekatnya hal tersebut merupakan pola sikap atau respons terhadap lingkungan ekologiannya. Respons tersebut mempunyai latar belakang yang berinteraksi dengan persepsi, pengalaman, kekayaan alam serta kebudayaan politik yang biasanya dimanifestasikan sebagai falsafah bangsa dan diakomodasikan dalam konstitusi”.

Sementara Rosenau seorang pakar dalam teori politik luar negeri, seperti yang dikutip Patric J. Mc Gowan (1974) mendefinisikan istilah tersebut, sebagai berikut “All the attitudes and activities through which organized national societies to cope with and benefit from their international environments”.

Politik luar negeri (foreign policy) merupakan seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara. K.J. Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

- a. Nilai (values) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.
- b. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek (short-term), jangka menengah (middle-term), dan jangka panjang (long-term).
- c. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang situasi-situasi yang terjadi secara faktual. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif digunakan agar peneliti dapat menangkap dan menjelaskan kompleksitas dari sebuah fenomena jika dibandingkan dengan metode penelitian kuantitatif yang menekankan pada generalisasi. Dalam konteks penelitian ini, penggambaran yang jelas dan nyata mengenai situasi dan permasalahan yang terjadi di kawasan Eropa yakni perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada negara-negara lain di seluruh dunia.

Metode penelitian ini akan membantu peneliti untuk menganalisis topik permasalahan yang diangkat dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara dan studi literatur yang dapat diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, maupun hasil penelitian yang valid. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami (understanding) dan menafsirkan (interpreting) sebuah perilaku atau interaksi sosial serta berusaha untuk menemukan makna (meaning), proses, konteks, sebuah perilaku atau peristiwa sosial yang sedang diamati (Bakry, 2016). Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, peneliti dituntut memiliki kepekaan tinggi (*High sensitivity*) dan kedalaman wawasan (*insight*) untuk dapat mencerna berbagai makna yang tersirat di balik setiap perilaku atau interaksi sosial (termasuk di sini perilaku aktor-aktor yang sedang berada dalam fase konflik).

Secara umum, ciri-ciri dari metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Danim, 2013) sebagai berikut : Pertama, bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa secara faktual. Kedua, bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail guna mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik - praktik yang sedang berlangsung. Ketiga, mendeskripsikan subyek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan. Keempat, metode penelitian deskriptif analisis tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti.

Adapun bentuk dari metode deskriptif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan konflik Rusia - Ukraina. Melalui penelitian ini dikumpulkan data untuk mengambil kesimpulan tentang

kebutuhan, kondisi dan lain-lain di dalam konflik perang Rusia-Ukraina mengenai aspek yang diselidiki. Selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan analisis deskriptif dalam penelitian ini dengan tujuan agar penelitian ini dapat menggambarkan serta menjelaskan mengenai bagaimana latar belakang terjadinya perang Rusia - Ukraina serta dampaknya bagi seluruh dunia terutama hubungan diplomasi antara Indonesia dan Rusia dalam menjaga perdamaian dunia.

PEMBAHASAN

Perang merupakan hal yang kompleks karena memiliki sisi positif dan negatif, unsur, definisi serta varian. Sisi positif dan negatif dari perang bergantung pada dampak, frekuensi, skala, perkembangan dan motivasinya. Pengertian perang dalam sosiologi yaitu gejala yang disebabkan oleh pertentangan yang mengakibatkan disorganisasi sosial dalam aspek kemasyarakatan. Perang akan menyisakan persoalan yang berkepanjangan seperti retaknya hubungan sosial, korban jiwa, harta, trauma dan menghambat perkembangan kepribadian korban. Pada dasarnya perang merupakan aksi mendominasi wilayah yang diperebutkan baik secara fisik maupun non-fisik. Zaman dahulu perang diartikan sebagai pertikaian bersenjata, pada era modern ini perang lebih mengarah ke arah teknologi dan industri.

Perang antara Ukraina - Rusia merupakan salah satu bentuk perang modern yang menggunakan teknologi dan industri. Propaganda kedua belah pihak membuat banyak pihak dan kalangan tidak memahami secara utuh masalah sebenarnya dalam konflik ini. Perang dingin antara Rusia-Ukraina yang dimulai tanggal 24 Februari 2022 dengan Rusia melancarkan aksi invasi serangan di wilayah Ukraina Timur. Ukraina merupakan salah satu tetangganya disebelah barat daya. Invasi ini menandakan munculnya kembali peristiwa yang telah terjadi dalam perang Rusia-Ukraina yang dimulai tahun 2014.

Adapun krisis di Ukraina adalah satu-satunya masalah internasional terpenting saat ini, yang melibatkan wilayah Krimea, sebuah komunitas yang didominasi secara otonom di Pegunungan Selatan yang berada di ambang kehancuran, yang memilih bergabung kedalam federasi Rusia. Krimea saat ini berada di bawah otoritas Rusia, mereka berhasil menerobos penjaga polisi lalu masuk dan merusak, orang-orang pro-Rusia meminta pemungutan suara pada pemerintahan baru dalam struktur penting. Perang tersebut mengakibatkan lebih dari 14.000 nyawa menghilang. Dalam hal itu Rusia-Ukraina mengadakan perjanjian damai Minsk untuk menghentikan konflik, dan pada awal 2021 situasi kembali tidak terkendali. Ukraina mendesak Amerika Serikat untuk memperbolehkan Ukraina bersatu pada NATO. Hal ini memicu Presiden Rusia marah, dan mulai mengerahkan pasukan di dekat perbatasan Ukraina.

Dari penjelasan tersebut diatas penulis mencoba untuk menguraikan lebih jauh latar belakang terjadinya perang Rusia dan Ukraina serta Dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap hubungan Diplomatik antara Indonesia dan Rusia.

Latar belakang perang antara Rusia dan Ukraina

Perang Rusia - Ukraina adalah perang berkelanjutan antara Rusia (bersama dengan pasukan separatis pro-Rusia) dan Ukraina. Konflik ini dimulai pada Februari 2014 setelah

Revolusi Martabat Ukraina, dan awalnya berfokus pada status Krimea dan bagian dari Donbas, yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Ukraina. Delapan tahun pertama konflik termasuk aneksasi Krimea oleh Rusia (2014) dan perang di Donbas (2014–sekarang) antara Ukraina dan separatist yang didukung Rusia, serta insiden angkatan laut, perang siber, dan ketegangan politik. Menyusul pembangunan militer Rusia di perbatasan Rusia-Ukraina dari akhir 2021, konflik meluas secara signifikan ketika Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Selain itu adanya protes Euromaidan dan revolusi yang mengakibatkan tersingkirnya Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovich pada Februari 2014, kerusuhan pro-Rusia meletus di beberapa bagian Ukraina. Tentara Rusia tanpa rencana mengambil kendali posisi strategis dan infrastruktur di wilayah Ukraina Krimea, dan merebut Parlemen Krimea. Rusia menyelenggarakan referendum yang dikritik secara luas, yang hasilnya adalah agar Krimea bergabung dengan Rusia. Pada April 2014, demonstrasi oleh kelompok pro-Rusia di wilayah Donbas Ukraina meningkat menjadi perang antara militer Ukraina dan separatist yang didukung Rusia dari republik Donetsk dan Lugansk yang dideklarasikan sepihak.

Pada Agustus 2014, kendaraan militer Rusia tanpa rencana melintasi perbatasan ke republik Donetsk. Perang yang tidak diumumkan dimulai antara pasukan Ukraina dan separatist bercampur dengan pasukan Rusia, di sisi lain meskipun Rusia berusaha menyembunyikan keterlibatannya. Perang berakhir menjadi konflik statis, dengan upaya gencatan senjata yang berulang kali gagal. Pada 2015 perjanjian Minsk II ditandatangani oleh Rusia dan Ukraina, tetapi sejumlah perselisihan mencegahnya untuk diimplementasikan sepenuhnya. Pada 2019, 7% wilayah Ukraina diklasifikasikan oleh pemerintah Ukraina sebagai wilayah pendudukan sementara.

Sebelum tahun 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet. Negara komunis yang kuat di zaman itu. Uni Soviet setelah Jerman kalah dan PD II selesai, memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tak heran jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga menjadi negara-negara komunis. Pada 1991 Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Ditahun yang sama Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun itu, menyetujui hal tersebut. Selanjutnya Rusia, Ukraina dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States (CIS). Namun perpecahan yang terjadi dinegara Ukraina, menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan. Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis di Krimea Ukraina. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan Pelabuhan Sevastopol.

Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Massa anti pemerintah berhasil melengserkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovich. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa (UE) dan NATO yang membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung makin eratnya

hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO. Sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Krimea di 2014. Rusia juga mendukung separatistis di Ukraina timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintah Ukraina.

Isu serangan bergulir sejak November 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Moskow diyakini Barat memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Intelijen Barat menyebut Rusia akan menyerang Ukraina. Pada bulan Desember, pemimpin dunia seperti Presiden AS Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi Barat jika menyerang Ukraina karena laporan yang semakin intens soal militer di perbatasan. Sejumlah pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga "turun gunung" menginisiasi negosiasi antara keduanya. Di sisi lain, Rusia juga mulai melakukan latihan militer besar-besaran sejak awal Januari 2022. Semua angkatan laut dikerahkan. Latihan ini juga dilakukan di darat. Rusia bekerja sama dengan Belarusia, tetangga dekat sekaligus sekutunya.

Rusia membantah akan menyerang kala itu. Namun, negeri Putin mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada Barat. Salah satu poinnya meminta NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia meminta aliansi tersebut untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota. Dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia 16 Februari, Duta Besar Rusia Untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva, mengatakan Rusia tidak pernah berniat menyerang tetangganya itu. Ia menyebut isu ini muncul setelah dihembuskan AS, NATO dan para aliansinya. Semua histeria yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah ditargetkan untuk mengalihkan isu dari keamanan negara kami terkait Federasi Rusia. Kami melihat ekspansi NATO yang telah berjalan selama 30 tahun lebih dan kini infrastruktur NATO makin dekat ke perbatasan kami. Pada situasi ini, Ukraina hanya dijadikan alat untuk mengobarkan informasi perang terhadap Rusia. Sementara negara kami tengah mengupayakan diplomasi, pihak Barat terus mengobarkan informasi perang dan menciptakan ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina.

Rusia meluncurkan serangan besar di seluruh Ukraina dan bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Kiev melalui cara militer. Meskipun Putin mengklaim sebaliknya, kemungkinan ini akan mencakup pendudukan beberapa wilayah oleh pasukan Rusia. Barat telah merusak Ukraina dan menariknya keluar dari orbit Rusia melalui perubahan identitas yang dipaksakan. Ukraina sendiri merupakan anggota PBB, yang artinya negara merdeka dan berdaulat. Jika Rusia diizinkan untuk membatasi kedaulatan Ukraina dengan mendikte aliansi Ukraina dan pilihan kebijakan luar negeri, dengan memerasnya dan melanggar integritas teritorialnya, itu dapat memberanikan orang lain yang ingin memperluas klaim teritorial ilegal termasuk di Laut China Selatan (LCS). Merusak prinsip-prinsip tatanan berbasis aturan internasional melemahkan fondasi kerja sama internasional dan pelanggaran Rusia mengancam perdamaian dan stabilitas di benua Eropa.

Pada tanggal 21 Februari 2022, pemerintah Rusia mengklaim bahwa penembakan Ukraina telah menghancurkan fasilitas perbatasan FSB di perbatasan Rusia-Ukraina, dan mengklaim telah menewaskan 5 tentara Ukraina yang mencoba menyeberang ke wilayah

Rusia. Ukraina membantah terlibat dalam kedua insiden itu dan menyebut mereka sebagai bendera palsu. Pada hari yang sama, pemerintah Rusia secara resmi mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk yang memproklamkan diri sebagai negara merdeka, menurut Putin tidak hanya di wilayah yang mereka kuasai secara de facto, tetapi juga Oblast Ukraina secara keseluruhan, dan Putin memerintahkan pasukan Rusia, termasuk tank untuk memasuki daerah.

Pada 24 Februari 2022, Presiden Rusia, Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina oleh Angkatan Bersenjata Rusia yang sebelumnya terkonsentrasi di sepanjang perbatasan. Invasi diikuti oleh serangan udara yang ditargetkan ke gedung-gedung militer di negara itu, serta tank yang masuk melalui perbatasan Belarusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengumumkan darurat militer di seluruh Ukraina. Sirene serangan udara terdengar di seluruh Ukraina hampir sepanjang hari. Infrastruktur IT Ukraina telah memburuk akibat serangan siber dan pemboman Rusia. Beberapa kota atau bangunan Ukraina telah diduduki, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Chernobyl. Namun, menurut seorang pejabat pertahanan AS, pasukan Rusia "menghadapi lebih banyak perlawanan" di muka terhadap Kiev daripada yang mereka harapkan. Pada tanggal 5 Desember 2022, Rusia melakukan serangan lain terhadap infrastruktur energi Ukraina - objek di wilayah Kiev, Odessa, dan Vinnytsia terkena serangan. Komando Ukraina mengatakan bahwa dari lebih dari 70 rudal dari berbagai jenis yang digunakan dalam serangan itu, lebih dari 60 ditembak jatuh.

Pada tahun 2021 dan awal 2022, terdapat pembangunan militer besar Rusia di sekitar perbatasan Ukraina. NATO menuduh Rusia merencanakan invasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengkritik perluasan NATO sebagai ancaman bagi negaranya dan menuntut Ukraina dilarang bergabung dengan aliansi militer. Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan pandangan iredentisme Rusia, mempertanyakan Ukraina hak untuk berdiri, dan menyatakan secara salah bahwa Ukraina diciptakan oleh Soviet Rusia. Pada 21 Februari 2022, Rusia secara resmi mengakui dua negara separatist yang memproklamkan diri di Donbas, dan secara terbuka mengirim pasukan ke wilayah tersebut. Tiga hari kemudian, Rusia menginvasi Ukraina. Banyak komunitas internasional mengutuk Rusia atas tindakannya di Ukraina pasca-revolusioner, menuduhnya melanggar hukum internasional dan melanggar kedaulatan Ukraina. Banyak negara menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia, individu Rusia atau perusahaan, terutama setelah invasi 2022.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, krisis atau perang antara Rusia dan Ukraina ini bermula pada November 2013 ketika Presiden Ukraina pada saat itu Victor Yanukovich menolak untuk menandatangani perjanjian kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan lebih memilih untuk menerima bantuan dari Rusia berupa pinjaman sebesar 15 miliar dolar AS dan potongan harga gas dari Rusia sebesar 30 persen. Keputusan Yanukovich tersebut kemudian menuai protes dari masyarakat Ukraina yang pro Barat, protes tersebut berlangsung di Kiev dan terus berlanjut hingga tahun 2014. Seiring berjalannya waktu aksi tersebut berubah menjadi protes yang menyebabkan kekerasan terbunuhnya puluhan demonstran dan ratusan orang mengalami dampak yang cukup signifikan. Berbagai upaya mediasi telah dilakukan, kesepakatan pembagian daerah pemerintah Ukraina kekuasaan juga dalam melibatkan beberapa mediator dari negara-negara di Eropa, antara lain Menteri Luar

negeri Prancis, Jerman dan Polandia. Tercapainya kesepakatan pembagian kekuasaan di Ukraina pada Februari 2014 nyatanya konflik sipil di Ukraina terus berlanjut.

Konflik menjadi semakin memanas karena Presiden Ukraina, Victor Yanukovich menghilang dari Kiev dan disusul dengan perilaku arogan para demonstran di beberapa gedung pemerintahan Ukraina. Victor Yanukovich resmi turun dari jabatannya digantikan sementara oleh Presiden Olexander Turchynov dan pada tahun 2015 lalu digantikan lagi oleh Presiden Petro Poroshenko yang kemudian terbentuklah sebuah pemerintahan baru di Ukraina yang pro Uni Eropa. Beralihnya kecenderungan politik Ukraina membuat Rusia menjadi semakin agresif karena usahanya untuk mendominasi Ukraina ternyata tidak berhasil. Krisis Ukraina terkait masalah status Krimea juga berdampak pada sanksi Ekonomi bagi Rusia, sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika dan Eropa berupa pelarangan pengiriman produk pertanian dan perikanan, seperti buah-buahan, daging, susu, ikan dan berbagai produk olahan lainnya, investasi, pariwisata, transportasi, energi, migas bahkan hingga sumber daya mineral.

Letak geografis Ukraina merupakan teritori yang sangat strategis dimana dalam hal ini Ukraina berperan sebagai buffer zone atau yang lebih dikenal sebagai jalur pipa untuk penyaluran Migas dari Rusia ke negara-negara di kawasan Eropa Barat. Berdasarkan data dari hampir dua per tiga penjualan gas Rusia ke Uni Eropa melalui pipa-pipa yang ditanam di bawah tanah Ukraina hal ini di sepakati oleh Ukraina dan Rusia sebelum adanya konflik. Dampak dari krisis dua negara ini dirasakan juga oleh negara anggota Uni Eropa lainnya karena sikap politik pemerintah Rusia yang melakukan penutupan terhadap pasokan gas bagi negara-negara Uni Eropa yang menyebabkan krisis energi di Uni Eropa.

Salah satu sikap politik pemerintah Rusia yang menempatkan ribuan pasukan militernya di sepanjang perbatasan Ukraina, merupakan konsekuensi dari memburuknya hubungan Rusia dengan negara-negara Barat. Keamanan negara Federasi Rusia yang merasa terancam dengan adanya intervensi Uni Eropa dan Amerika Serikat yang tergabung dalam organisasi NATO. Sebagai upaya diplomasi pemerintah Rusia telah mengirimkan surat tuntutan kepada NATO, salah satu poin penting yang ingin disampaikan adalah menolak ide bergabungnya Ukraina kedalam organisasi tersebut.

Perang Rusia dan Ukraina merupakan pertarungan antar dua negara yang paling mendapat sorotan di abad ke-21. Operasi militer khusus yang dilancarkan Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 membawa dampak yang sangat besar pada dunia yang tengah berjuang untuk pulih dari pandemi Covid-19. Konflik antara Rusia dan Ukraina sejatinya merupakan konflik antara Rusia dan Barat, di mana Ukraina menjadi proxy tunggangan negara Barat. Negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat menghendaki Rusia lemah dan tidak berdaya dalam percaturan dunia. Serangan militer Rusia ke Ukraina membuat perkembangan geopolitik dunia semakin dinamis. Ketegangan hubungan antara negara-negara Barat yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization, NATO) dan Rusia mengarah pada konflik yang semakin meluas dan berpotensi membahayakan kelangsungan hidup manusia di dunia. Sejarah konflik antara Rusia dan Ukraina sebetulnya merupakan sejarah hubungan kedua negara sejak terbentuknya Ukraina dan Rusia.

Dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap hubungan Diplomatik antara Indonesia dan Rusia

Hubungan Indonesia–Rusia mengacu kepada hubungan luar negeri bilateral antara Indonesia dan Rusia. Rusia memiliki kedutaan besar di Jakarta dan Indonesia memiliki kedutaan besar di Moskow serta Konsulat Jenderal di Saint Petersburg. Kedua negara adalah anggota APEC dan G-20. Menurut jajak pendapat Pew Research Center 2018, 46% orang Indonesia memiliki pandangan yang baik tentang Rusia, dengan 31% menyatakan pandangan negatif.

Indonesia dan bahkan Jakarta yang masih bernama Batavia waktu itu lebih dikenal lagi di kalangan Rusia pada paruh keempat abad XVII ketika terjadi hubungan ekonomi dan perdagangan antara Rusia dengan Belanda, dimana Belanda telah menjadikan Indonesia sebagai wilayah kolonialnya sejak masuk ke Indonesia pada tahun 1602. Hubungan laut membantu mengembangkan kerja sama Indonesia-Rusia, termasuk bidang perdagangan. Kapal-kapal perang Rusia dalam perjalanan ke Vladivostok sering singgah di Jawa dan Sumatra. Untuk meningkatkan hubungan kedua pihak, pada tahun 1885 di Batavia didirikan Konsulat tetap Rusia dan pada tahun 1894 atas usulan Kementerian Kelautan Rusia, Konsulat tersebut diubah menjadi konsulat tetap dengan Konsulnya bernama M. Bakunin yang merupakan Konsul pertama dan terakhir pada waktu itu.

Pada tanggal 25 Januari 1950, Menteri Luar Negeri Uni Soviet, A. Vyshinsky menyampaikan secara tertulis kepada Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Moch. Hatta bahwa Uni Soviet mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, dan keinginan menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut baik hal tersebut. Pada bulan Mei 1950 Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh N. Palar dengan anggotanya terdiri dari Yusuf Wibisono, Yamin dan Hadinoto berkunjung ke Moskow untuk melakukan perundingan dan hasil dari perundingan tersebut disampaikan pada Sidang Kabinet yang dihadiri Presiden Soekarno, 16 Mei 1950, yaitu kesepakatan untuk saling membuka Kedutaan Besar dan tanggapan positif Uni Soviet mengenai masuknya Indonesia menjadi anggota PBB.

Pada tanggal 28 Agustus - 12 September 1956 Presiden Soekarno berkunjung ke Moskow. Dalam kunjungan tersebut, pada tanggal 11 September 1956 dihadapan Presiden Soekarno dan petinggi-petinggi Uni Soviet seperti Mikoyan, Voroshilov, Kaganovich dan Malenkov, Menteri Luar Negeri Indonesia Ruslan Abdulgani dan Wakil Menteri Luar Negeri Uni Soviet Gromyko menandatangani Kesepakatan Bersama (Joint Statement). Pada bulan Juni 1961 Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Uni Soviet dan pada tahun 1957 Ketua Presidium Uni Soviet Tertinggi K.Y. Voroshilov serta pada Februari 1960 Perdana Menteri Nikita Khrushchev berkunjung ke Indonesia.

Hasil dari saling kunjung tersebut dicapai kesepakatan-kesepakatan peningkatan hubungan dan kerjasama di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, maupun militer, seperti pengucuran bantuan dana, pembangunan berbagai proyek dan pemasokan peralatan militer dari Uni Soviet untuk Indonesia. Proyek-proyek pembangunan bantuan Uni Soviet untuk Indonesia seperti pembangunan Rumah Sakit “Persahabatan”, stadion “Gelora Bung Karno”, Hotel Indonesia, pembangunan jalan, jembatan dan lapangan terbang di sejumlah daerah di Indonesia, pembangunan pabrik baja

dan fasilitas-fasilitas lainnya, sebagaimana diungkapkan Direktur Keamanan Diplomati Kementerian Luar Negeri RI, Bapak Agung Cahaya Sumirat dalam wawancaranya dengan peneliti sebagai berikut:

“Rusia dan Indonesia mempunyai kontak sejarah yang panjang. Sebelum terjadinya kebangkitan nasional di Indonesia tahun 1908 dan juga revolusi Oktober di Rusia tahun 1917, telah terjalin kontak antara kedua bangsa. Hubungan laut membantu mengembangkan kerja sama Indonesia-Rusia, termasuk bidang perdagangan. Kapal-kapal perang Rusia dalam perjalanan ke Vladivostok sering singgah di Jawa dan Sumatra. Melalui jalur laut Rusia mengeksplor minyak tanah dan peralatan-peralatan pabrik ke Indonesia, sementara dari Indonesia mengimpor kopi, teh, tembakau, kopra, rempah-rempah dan timah”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dengan negara Rusia dalam melakukan Kerjasama/hubungan Bilateral antar kedua negara dalam memajukan pembangunannya, beberapa hubungan yang telah dilakukan kedua negara tersebut antara lain hubungan ekonomi, perdagangan, militer, pertukaran pelajar dan pertahanan negara. Salah satu bentuk hubungan bilateral antar negara Rusia dan Indonesia yaitu pada akhir 2007, Indonesia membeli persenjataan militer dari Rusia dengan pembayaran jangka panjang senilai \$ 1 miliar Dollar, untuk pembelian kapal-kapal selam, tank dan helikopter serta melengkapi jet-jet tempur Sukhoi. Maskapai penerbangan Indonesia juga mempertimbangkan untuk membeli Sukhoi Superjet 100 dari Rusia tetapi kecelakaan ujicoba pada 2012 telah menyebabkan penangguhan pembelian. Pihak Indonesia menyatakan analisis perekaman data penerbangan yang diselamatkan dari lokasi kecelakaan dapat memakan waktu sampai setahun lamanya.[4] Sekarang ini, kedua negara adalah anggota G-20 dan APEC.

Rusia sebagai pasar potensial bagi produk Indonesia, seperti minyak sawit, produk ikan, kopi, garmen, sedangkan Rusia menawarkan gandum dan produk-produk berteknologi tinggi kepada Indonesia. Kerja sama ini dapat saling melengkapi satu sama lainnya. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, nilai perdagangan Indonesia dengan Rusia tahun 2018 adalah \$ 2,55 milyar, Januari-November 2019 sebesar \$ 1,92 miliar dan periode November 2023 mencapai \$ 3,05 miliar. Nilai ini sebenarnya sangat kecil dibanding potensi yang ada. Rusia adalah kekuatan ekonomi nomor 12 dunia sementara Indonesia nomor 16.

Tanggal 24 Februari 2023 menandai tepat setahun perang Ukraina-Rusia. Kala Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi pada 24 Februari 2022, ia memulai perang yang menewaskan ratusan ribu orang, memorakporandakan kota-kota, dan melemahkan perekonomian global. Hal tersebut merupakan puncak konflik dari tahun 2014. Pada tahun tersebut Rusia dan Ukraina berkonflik sehingga berujung pada aneksasi Krimea. Perang yang diprediksi Putin hanya bakal beberapa jam, telah berlangsung hingga setahun dan belum kelihatan akhirnya. Perang telah menewaskan atau melukai 180.000 tentara Rusia dan 100.000 tentara Ukraina. Sumber Barat lain memperkirakan, korban jatuh di kedua pihak masing-masing sekitar 150.000 orang.

Sebagai perbandingan, sekitar 15.000 tentara Uni Soviet tewas dalam pertempuran di Afghanistan tahun 1979-1989. Tentara Ukraina kerap menggunakan istilah “umpan meriam”

untuk menggambarkan bagaimana tentara Rusia menemui ajal di garis depan pertempuran. Banyak di antara mereka peserta wajib militer yang tidak terlatih, terutama menghadapi pasukan Ukraina yang bertekad mempertahankan negaranya. Saat pasukan Moskwa mengambil alih kota Mariupol di selatan Ukraina pada akhir Mei 2022 setelah bombardir besar-besaran selama tiga bulan, Kyiv menyebut sedikitnya 20.000 warga sipil Ukraina tewas. Belasan ribu warga sipil masih tinggal di Bakhmut. Mereka berlindung di ruang bawah tanah tanpa air bersih atau listrik. Sesekali mereka harus bertaruh nyawa kala berusaha keluar untuk mencari udara segar, makanan, air, dan bahan bakar.

Sekitar 65.000 dugaan kejahatan perang telah dilaporkan sepanjang jalannya pertempuran. Demikian laporan dari komisioner pengadilan Uni Eropa, Didier Reynders. Penyelidik dari pihak PBB menuding, Rusia telah melakukan kejahatan perang dalam skala besar dan masif di Ukraina, seperti pengeboman, eksekusi, penyiksaan, pembunuhan massal hingga kejahatan seksual. Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) meluncurkan investigasi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada tahun 2022. Namun, ICC tidak bisa menuntut Rusia dan Ukraina atas tuduhan tersebut karena kedua negara yang bertikai bukan termasuk dalam keanggotaan ICC.

Kyiv menuding Moskwa memaksa deportasi lebih dari 16.000 anak ke Rusia atau wilayah yang dikuasai separatis dukungan Moskwa. Sebaliknya, beberapa lembaga swadaya masyarakat mengecam Ukraina karena melanggar hak tahanan perang Rusia, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Di antara seluruh medan perang yang paling panas adalah kota Bakhmut, yang dijuluki 'neraka di dunia' oleh tentara Ukraina. Selain banyaknya jumlah korban, kota-kota dengan segala infrastrukturnya pun banyak yang hancur sebagai dampak dari peperangan yang terjadi, terutama di wilayah Ukraina timur. Sekitar 3.000 sekolah dan 239 situs budaya juga terdampak perang.

Membangun kembali Ukraina setelah invasi Rusia diperkirakan bisa menelan biaya hingga 349 miliar dollar AS, berdasarkan kajian bersama Pemerintah Ukraina, Komisi Eropa, dan Bank Dunia. Negara yang terkenal dengan ekspor sereal dan minyak bunga matahari ini mengalami kerugian hingga 34 miliar dollar AS hanya dari sektor pertanian. Warga yang mengungsi karena perang di Ukraina meninggalkan stasiun kereta api Przemysl di Przemysl, Polandia. Upaya untuk membawa warga sipil ke tempat yang aman dan memberikan bantuan sedang berlangsung di wilayah Ukraina. Sebagian besar warga di setiap negara setuju bahwa negara mereka harus mendukung kedaulatan sebuah negara yang diserang.

Di tengah konflik Rusia versus Ukraina, Indonesia mempunyai kesempatan untuk memainkan perannya sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya. Untuk memahami bagaimana peran tersebut akan dan harus di implementasikan, publik dapat menyimak pandangan pejabat di Kementerian Luar Negeri dan pengamat politik internasional. Hal tersebut sesuai hasil wawancara peneliti dengan Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri, bapak Winardi Hanafi sebagai berikut:

"Indonesia konsisten dengan prinsip bebas aktif dalam menyikapi krisis yang terjadi di Ukraina, "bebas aktif bukan berarti netral aktif, tetapi juga memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun bantuan terhadap penyelesaian konflik. Sikap Indonesia juga bukan sekadar mengikuti negara lain, melainkan berkepentingan untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap norma hukum internasional"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, Indonesia akan terus mendorong agar penggunaan kekuatan dapat dihentikan dan semua pihak dapat menyelesaikan sengketa. Tentang perang Rusia dan Ukraina, Indonesia menilai langkah terbaik terhadap situasi tersebut adalah dengan deeskalasi sehingga proses perundingan dapat berjalan lebih efektif dan memungkinkan dibukanya jalur kemanusiaan. Terkait posisi Indonesia dalam krisis Ukraina, pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina karena kedua negara adalah sahabat Indonesia.

Kebijakan Indonesia untuk politik luar negeri bebas aktif sudah sangat tepat, invasi Rusia ke Ukraina menjadi pendorong negara-negara ASEAN untuk bersatu dan tidak membuat ancaman bagi negara manapun. Dunia perlu membangun sistem keamanan global yang transparan untuk mencegah invasi negara-negara besar. Untuk membangun sistem internasional yang aman adalah dengan sistem internasional yang tidak membiarkan orang seperti Putin mempunyai justifikasi untuk perang. Invansi Rusia ke Ukraina tidak dapat dibenarkan. Namun, ada banyak pihak yang bertanggung jawab atas perang yang telah memakan banyak korban tersebut, tidak hanya Rusia, tetapi juga Barat dan Ukraina serta para pemimpinnya.

Rusia salah satu pihak yang memang paling bertanggung jawab atas serangan ini. Tapi ternyata banyak pihak-pihak lain yang berkontribusi, termasuk Ukraina dan para pemimpinnya juga berperan untuk menciptakan konflik ini. Ukraina, negara-negara anggota NATO dan Amerika Serikat, membiarkan Presiden Rusia Vladimir Putin mempunyai justifikasi untuk melakukan serangan. Oleh karena itu perlunya system internasional yang bisa mencegah negara-negara besar seperti Rusia dan AS memiliki justifikasi untuk melancarkan serangan yakni dengan membangun sistem keamanan global atau global architecture yang lebih transparan sehingga tidak menjadi alasan bagi penghasut perang untuk menjustifikasi apapun tindakan mereka, baik dari sisi keamanan dirinya ataupun stabilitas global.

Sikap Indonesia juga bukan sekadar mengikuti negara lain, melainkan berkepentingan untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap norma hukum internasional.” dimana dalam hal ini negara “Indonesia akan terus mendorong agar penggunaan kekuatan dapat dihentikan dan semua pihak dapat menyelesaikan sengketa. Tentang perang Rusia dan Ukraina, Indonesia menilai langkah terbaik terhadap situasi tersebut adalah dengan deeskalasi sehingga proses perundingan dapat berjalan lebih efektif dan memungkinkan dibukanya jalur kemanusiaan. sehingga ada kejelasan dan adanya penegasan dari Indonesia bahwa tidak ada kerpihakan dalam hal ini ada dampak dari politik bebas aktif yang mampu di optimalkan oleh Indonesia untuk mendorong perdamaian segera dikembalikan di Ukraina. Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk memastikan solusi damai melalui dialog dan diplomasi. Indonesia meminta semua negara harus menghormati tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB serta hukum internasional termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.

Sejak Russia mendeklarasikan perang pada tanggal 24 Februari 2022, terdapat beberapa hal yang dapat menimbulkan akibat dari terjadinya perang tersebut, salah satunya adalah dampak bagi perekonomian di Indonesia, volume perdagangan yang tidak naik tetapi masih ada inflasi karena Rusia dan Ukraina merupakan salah satu sumber energi terbesar.

Dalam menyelesaikan konflik tersebut salah satunya pada pasal 33 PBB, prioritasnya yaitu penghentian gencatan senjata biasanya melalui perundingan diplomatik (jalur politik maupun hukum) sedangkan Ukraina sudah submit ke ICC dalam jalur hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Bapak L. Amrih Jinangkung sebagai berikut:

“Untuk menghentikan melalui jalur politik akan menjadi kurang efektif karena Rusia mempunyai hak veto sehingga bisa memveto Rusia dalam kasus ini, perlu adanya reformasi dalam hal memvoting. Namun, pada Jalur Hukum, terjadi disagregasi kasus dimana hal tersebut membuat banyak sekali kasus hukum yang mungkin kurang dipahami sebab atau akibat oleh ICJ, dimana Ukraina menuduh Rusia mendanai terorisme dua wilayah Ukraina dan pelanggaran diskriminasi rasial.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Rusia tidak menyanggah yurisdiksi ICJ namun Rusia menyanggah di yurisdiksi materinya, tetapi meskipun begitu perundingan mengenai disagresi kasus-kasus yang ada antara Rusia dan Ukraina masih belum berlanjut karena masih ada pelanggaran hukum internasional pada Rusia dan Ukraina sejak invasi. Sama seperti pasal 33 PBB, secara politik respon Kementerian Luar Negeri Indonesia menganggap serangan militer Rusia terhadap Ukraina tidak dapat diterima dan dapat membahayakan politik bebas aktif. Hal ini menyebabkan tidak efektif pada PBB karena banyak terjadi pelanggaran. Majelis Umum (MU) memiliki residual power yang bisa diambil alih namun resolusinya lemah karena tidak terikat hukum. Indonesia merupakan ketua presidensi G20 sehingga memiliki kemungkinan membujuk sidang luar biasa.

Ukraina merupakan bagian terdekat dengan perbatasan Rusia, sehingga Rusia masih ingin mempertahankan Ukraina. Terdapat dua kubu di Ukraina yaitu Pro-Rusia dan anti Rusia. Pro-Rusia ada di wilayah Ukraina termasuk Krimea, diperangi oleh negara sebagai gerakan separatis. Keinginan Ukraina menjadi salah satu anggota NATO menjadi salah satu pemicu ketegangan, dan dianggap mencederai keloyaltasan pasca perang dunia. Konflik bersenjata Internasional terjadi di antara 2 negara yang merupakan ke 4 anggota dari Konvensi Genewa yang mempunyai prinsip yang terkandung pada prinsip hukum perang. Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 51 PBB kurang berlaku bagi mereka. Prinsip Hukum Humaniter Internasional, yaitu prinsip perbedaan, pembatasan, proporsional. Perang boleh dilakukan namun harus sesuai dengan prinsip HHI. Ukraina saat ini memberikan pengakuan pada ICC, meskipun mereka bukan negara ICC namun pasal 11, 12, dan 13 mempunyai yurisdiksi terjadi kejahatan perang walaupun negara diluar keanggotaan. Ukraina merasa kondisi ini adalah waktu yang tepat untuk pembuktian agar tidak terjadi genosida. Indonesia seperti sedikit berpihak pada Rusia karena ada perbedaan statement antara Hukum internasional dengan statement Kementerian Luar Negeri Indonesia. Asean memiliki role dalam konflik ini karena memandang kasus ini berdasarkan kekeluargaan.

Indonesia merupakan presiden dari G20 yang mempunyai role yang cukup kuat karena konflik ini berdampak pada ekonomi, tidak hanya Negara pelaku namun juga seluruh dunia. Sangat dimungkinkan pengupayaan jalur perdamaian yang merupakan suatu bentuk peran netral dalam komunitas Internasional. Apa yang dilakukan Indonesia yang merujuk dalam pengupayaan perdamaian, memungkinkan untuk membangun stabilitas Internasional yang baik. Negara-negara anggota NATO memiliki keuntungan untuk menerima Ukraina

bergabung. Dengan adanya pihak ketiga seperti NATO, justru merusak hubungan diantara kedua negara itu, sehingga NATO sebaiknya perlu hati-hati karena kedua negara tersebut memiliki hubungan yang erat dan menimbulkan resiko yang besar. Apabila Ukraina masuk ke dalam keanggotaan NATO sama aja itu melanggar perjanjian Uni Soviet. NATO tidak ingin Rusia menjadi negara dengan kekuatan yang besar, sehingga NATO menawarkan diri ke Ukraina pasca memerdekakan diri untuk meningkatkan kekuatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Ibu Tika Wihanasari dijelaskan bahwa:

“Pada dasarnya konflik antara Rusia dan Ukraina sudah mengakar sejak lama, kedekatan Ukraina serta keinginannya untuk bergabung dengan Uni Eropa dan Aliansi Pertahanan NATO menjadi penyebab tidak harmonisnya hubungan Ukraina dengan Rusia. Keinginan Ukraina untuk bergabung dengan aliansi pertahanan NATO semakin mengganggu Rusia, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh NATO di Eropa Timur semakin meluas dan terus mendekati Rusia yang dinilai oleh Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam eksistensi negaranya.”

Dari wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa, isu serangan oleh Rusia ke Ukraina telah muncul pada akhir tahun 2021, ini dilihat dari citra satelit yang menunjukkan penumpukan baru personel dan peralatan militer Rusia, termasuk tank, artileri dan pengangkut pasukan lapis baja di perbatasan Ukraina. Barat menganggap Rusia memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat militer lainnya, kemudian intelijen barat juga menyebut Rusia akan melakukan penyerangan ke Ukraina. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, menyatakan diplomasi dan negosiasi akan mengakhiri perang di negaranya, yang telah berlangsung hampir setahun akibat agresi Rusia.

Negosiasi dapat terjadi jika tentara Rusia meninggalkan Ukraina, dan membebaskan seluruh wilayah yang mereka duduki. Penyelesaian perang secara sangat bagus dan efisien, para diplomat top dunia untuk mencoba membujuk Rusia atau mungkin mengancam Rusia. Diplomasi bisa bekerja untuk mencoba membujuk pihak yang agresif untuk berhenti menyerang. Ukraina terbuka untuk melakukan perundingan damai, tetapi tidak demikian halnya dengan Rusia. Perjanjian Minsk, sebuah upaya untuk mengamankan gencatan senjata antara pasukan Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di timur Ukraina, sebagai “buatan” Rusia. Perjanjian Minsk I, yang ditandatangani pada 2014 dan diperbarui dengan Perjanjian Minsk II pada 2015, juga menyusun tata cara pemilu di wilayah Luhansk dan Donetsk, serta rencana mengintegrasikan dua wilayah itu ke Ukraina dan perjanjian tersebut tidak pernah dipenuhi dan dilaksanakan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Ibu Ani Nigieriawati menyampaikan sebagai berikut:

“Diplomasi publik yang dikemukakan oleh Mark Leonard, asset soft power: strategic narrative Rusia dalam mengonter persepsi negatif dunia diarahkan pada pelaksanaan atau implememtasi dari tiga dimensi strategi diplomasi publik yaitu news management, strategic communication dan relationship building. Ketiga dimensi ini memberikan peranan penting dalam menciptakan daya tarik suatu negara dan

masyarakat internasional yang dapat menciptakan self-images suatu negara dan dapat memobilisasi sikap serta dukungan publik terhadap isu tertentu.”

Dari wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa temuan tentang bagaimana dimensi ini diaplikasikan sebagai upaya diplomasi Rusia di Indonesia. News Management, penyebaran informasi terkait dengan tindakan Rusia di Ukraina, media memainkan peran penting dalam melaksanakan strategi dimensi diplomasi publik. Media komunikasi dan informasi mudah digunakan sebagai media promosi karena jangkauannya keseluruhan dunia dan dapat diakses oleh siapa saja. Dimensi news management merupakan strategi diplomasi publik berupa penyampaian isu tentang tindakan militer Rusia ke Ukraina dari sudut pandang Rusia kepada publik domestik dan publik internasional.

Rusia telah memperketat undang-undang terkait dengan media, terutama setelah perang pecah di Ukraina. Peraturan tentang publikasi ‘berita palsu’ tentang tindakan Rusia ke Ukraina ditekan oleh Putin dan disetujui oleh parlemen pada 4 Maret 2022. Rusia juga melarang penggunaan kata-kata seperti ‘perang’ dan ‘invasi’ di media untuk mengatakan tindakan Rusia di Ukraina. Kemudian orang melanggar karena menyebarkan informasi palsu atau informasi yang tidak sesuai atau sejalan dengan kebijakan Rusia dalam perang Ukraina dapat dijatuhi penjara hingga 15 tahun. Kemudian orang melanggar karena menyebarkan informasi palsu atau informasi yang tidak sesuai atau sejalan dengan kebijakan Rusia dalam perang Ukraina dapat dijatuhi penjara hingga 15 tahun. Seperti pada penjelasan sebelumnya, salah satu platform media sosial yang digunakan oleh Rusia adalah Facebook (Russian Embassy in Indonesia) yang merupakan akun resmi kedutaan besar Rusia untuk Indonesia. Pada penelitian ini, penulis menemukan data bahwa Facebook Russian Embassy in Indonesia pada tahun 2022 (Februari-Desember 2022) sangat intens membagikan informasi tentang krisis yang terjadi di Ukraina dan mempromosikan pandangan Rusia tentang hal tersebut. Hal ini dikarenakan krisis di Ukraina kembali menjadi sorotan utama dunia pasca Rusia melakukan operasi militer ke Ukraina yang memberikan dampak meningkatnya persepsi negatif terhadap Rusia, termasuk krisis pangan dan energi.

Diplomasi Indonesia ke Ukraina

Indonesia melakukan diplomasi ke Ukraina melalui cara kunjungan diplomatik, pembentukan dan penguatan kerja sama, serta negosiasi resolusi konflik. Kunjungan diplomatik Indonesia ke Ukraina berlangsung pada tanggal 29 Juni 2022, yang mana Presiden Joko Widodo bertemu secara langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pertemuan ini merupakan upaya pertama diplomasi Indonesia secara langsung dalam merespon konflik Rusia - Ukraina, dan juga menandakan bahwa Indonesia merupakan negara Asia pertama yang mengunjungi Ukraina. Pada pertemuan diplomatik ini, Presiden Joko Widodo meyakinkan Presiden Zelensky bahwa kunjungan tersebut merupakan murni dorongan aspirasi dan dukungan masyarakat Indonesia ke Ukraina, serta menginginkan perdamaian antar kedua negara. Melihat motivasi tersebut, Presiden Zelensky merespon positif dengan mengatakan bahwa sangat menghargai dukungan dari Indonesia dalam mewujudkan kebebasan dan kemerdekaan Ukraina. Tahap selanjutnya dari kunjungan misi perdamaian Indonesia ke Ukraina yaitu menguatkan dan membentuk kerja sama bilateral.

Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa tepat pada bulan Juni 2022, merupakan perayaan 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia – Ukraina. Oleh sebab itu, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama bilateral yang telah ada sebelumnya. Mengingat pada tahun 2020 silam, Indonesia dan Ukraina telah sepakat meningkatkan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, pertahanan, intelijen, budaya, pendidikan, dan pariwisata. Pada saat itu juga disahkan perjanjian kerja sama pertahanan Indonesia-Ukraina.

Berlandaskan hubungan yang kooperatif tersebut, pada kunjungan Presiden Joko Widodo pada Juni 2022, terus berupaya membangun komunikasi yang kooperatif, sehingga menghasilkan kesepakatan kerja sama dengan Ukraina di bidang visa. Indonesia dalam momen ini juga memberikan berbagai bantuan terhadap Ukraina. Bantuan dari Indonesia berupa pemberian obat-obatan dan bantuan pembangunan rumah sakit di Kyiv, Ukraina. Selain itu, kedua negara membahas mengenai potensi kerja sama rekonstruksi pasca perang di Ukraina. Merespon kondisi konflik Rusia – Ukraina yang memanas dan belum usai, Presiden Joko Widodo menegaskan posisi Indonesia sebagai negosiator antara Rusia dan Ukraina, yang mana bertujuan untuk mendapatkan titik terang perdamaian antar kedua negara. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa meskipun susah diraih, akan tetapi semangat perdamaian harus terus dilontarkan dan diperjuangkan.

Peran mediator Indonesia dalam konflik ini terlihat dari bersedianya Indonesia melalui Presiden Joko Widodo untuk meneruskan pesan dari Presiden Zelensky, yang mana diharapkan dapat mencapai titik kesepakatan damai. Indonesia mengirimkan pesan Ukraina terhadap Rusia, terutama mengenai dibukanya jalur supply chain termasuk ekspor impor makanan dan gandum, yang mana tidak hanya mempengaruhi kedua negara saja tetapi juga dunia internasional. Diplomasi dan negosiasi Indonesia ke Ukraina tidak hanya sampai disitu saja, Indonesia juga mengundang Ukraina untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Indonesia.

Agenda tersebut menjadi ajang untuk pemulihan ekonomi global, serta diharapkan menjadi upaya mewujudkan perdamaian dan stabilitas global. Indonesia melalui Presiden Joko Widodo mengundang Presiden Zelensky untuk hadir di KTT G20, yang mana juga akan dihadiri oleh Rusia, sehingga pada agenda tersebut kedua negara dapat saling berdialog dan negosiasi secara langsung, dengan dipandu oleh negara-negara G20. Langkah ini merupakan salah satu upaya nyata dari Indonesia untuk berperan aktif mewujudkan perdamaian konflik Rusia – Ukraina. Merespon undangan tersebut, Presiden Zelensky mengatakan bahwa berterima kasih atas undangan yang diberikan untuk ikut dalam KTT G20, akan tetapi Ukraina dapat memastikan hadir tergantung pada situasi dan kondisi keamanan di Ukraina.

Kunjungan Diplomati Indonesia ke Rusia Pada awal terjadinya konflik Rusia-Ukraina, respon pertama Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri adalah dengan mengutuk aksi penyerangan tersebut dengan tanpa menyebutkan bahwa Rusia sebagai pihak agresor. Indonesia sendiri menghimbau Rusia dan juga Ukraina agar segera menyelesaikan konflik tersebut dalam jangka waktu yang dekat dan melalui jalur damai. Melalui pernyataan resmi, Presiden Joko Widodo juga menyerukan bahwa konflik yang terjadi dapat menghambat proses pemulihan perekonomian global pasca pandemi (Storey & Choong, 2022). Bentuk dari pernyataan resmi oleh kepala negara dan kementerian luar negeri tersebut merupakan langkah awal Indonesia untuk melakukan komunikasi terhadap pihak yang

bertikai, terutama Rusia. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam menanggapi terjadinya konflik tersebut dengan menyatakan yang menjadi perhatian utama bagi Indonesia adalah kenaikan harga pangan yang dapat membahayakan banyak negara, terutama bagi negara berkembang. Dalam melakukan kunjungan diplomatik ke Rusia, terdapat dua tujuan penting yang dibawa oleh Indonesia yakni: 1) untuk melakukan persuasi kepada Presiden Vladimir Putin guna membuka rute suplai ekspor gandum Ukraina di tengah berjalannya konflik, dan 2) Mengundang Putin untuk menghadiri KTT G20 di Bali pada November mendatang (Strangio, 2022). Pencapaian akan kedua tujuan tersebut akan memperkuat posisi Indonesia dalam politik internasional, sembari memenuhi kepentingan nasionalnya.

Pada 30 Juni 2022, Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Vladimir Putin untuk membahas tentang isu perdamaian dan kemanusiaan terkait konflik Rusia-Ukraina, sembari mengutarakan dua tujuan penting sebelumnya. Indonesia menegaskan pesan serta perhatiannya terhadap konflik yang menyebabkan krisis keamanan dan juga humanitarian, sekaligus menjadi mediator bagi kedua negara untuk mencapai perdamaian. Kemudian Indonesia juga ‘membujuk’ Rusia agar kembali menghidupkan semangat perdamaian dan multilateralisme, terutama dalam hal untuk memperbaiki rantai pasok pangan dunia yang telah terdisrupsi akibat dari perang (Kementerian Luar Negeri RI, 2022a).

Sebagai output dari pertemuan tersebut, Presiden Vladimir Putin bersepakat untuk membuka jalur ekspor gandum Ukraina dan juga memberikan jaminan suplai terhadap komoditas pupuk Rusia dalam upaya untuk reintegrasi kedua komoditi tersebut ke dalam rantai pasok global (Kementerian Luar Negeri RI, 2022a). Ia juga mengkonfirmasi kehadiran Rusia pada KTT G20 mendatang, walaupun belum dapat dikonfirmasi kehadirannya secara personal atau melalui komunikasi daring. Selain itu Rusia juga menawarkan kerja sama di bidang pembangunan transportasi kereta api dan juga energi nuklir untuk Ibukota Nusantara (IKN) di masa mendatang. Melihat hal ini, dapat dikatakan bahwasanya kunjungan Presiden Indonesia ke Rusia merupakan bentuk dari pemenuhan kepentingan domestik, terlepas klaim yang menyatakan bahwa tidak ada kepentingan tertentu dibalik kunjungan tersebut.

Terdapat setidaknya enam agenda prioritas jalur keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia. Secara berurut;

1. Exit Strategy to Support Recovery, yaitu sebuah agenda yang diperuntukkan untuk membahas peran G20 dalam melindungi negara - negara berkembang yang berusaha bangkit menuju pemulihan ekonomi;
2. Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth, pada agenda ini pembahasan difokuskan pada upaya dalam mengatasi dampak jangka panjang (scarring effect) krisis dengan cara meningkatkan produktivitas, ketenagakerjaan, household, korporasi, dan finansial;
3. Payment System in Digital Era, agenda pembahasan seputar penetapan standar pembayaran lintas batas negara serta pembahasan komprehensif terkait pengembangan CBDC (Central Bank Digital Currency);
4. Sustainable Finance, bertujuan dalam membahas isu resiko iklim dalam konteks resiko transisi menuju ekonomi berbasis lingkungan;

5. 5) Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion & SME Finance, pembahasan pada agenda ini akan tertuju pada ide pemanfaatan open banking dalam upaya mendorong produktivitas, ekonomi, serta keuangan.
6. International Taxation, agenda ini secara khusus akan membahas perpajakan internasional dalam implementasi Framework bersama OECD.

Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Rusia Pasca Perang (Rusia-Ukraina)

Hubungan ekonomi antara Rusia dan Indonesia berkembang perlahan sejak Perang Dingin. Pada tahun 2016, total perdagangan antara kedua negara mencapai US \$2,6 miliar. Komoditi Migas dan petrokimia yang menyumbang 64% dari ekspor Rusia ke Indonesia. Kemudian, pada tahun 2015, karet dan bahan makanan menjadi komoditi terbesar dari impor Rusia. Kedua negara juga secara aktif mengejar sejumlah proyek energi bersama dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pengembangan ladang minyak lepas pantai di Laut Jawa. Selain itu, Inter RAO Rusia juga telah membahas proyek untuk membangun pembangkit listrik 1,8 gigawatt di Indonesia sebesar US \$2,8 miliar. Kemudian, pada November 2017, Rosneft dan Pertamina, sebuah perusahaan energi Indonesia menandatangani perjanjian baru senilai US \$15 miliar untuk mengembangkan kompleks kilangminyak dan petrokimia baru di Jawa Timur. Kerjasama ini diharapkan menjadi pusat regional utama untuk distribusi minyak di seluruh Asia Tenggara. Kedua negara juga membahas kemungkinan kerjasama untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir tradisional untuk Indonesia.

Rusia dan Indonesia juga telah meningkatkan kerja sama ekonomi yakni pembuatan pesawat Rusia Sukhoi yang baru-baru ini membuat terobosan ke pasar penerbangan Indonesia yang sedang berkembang. Pada tahun 2011, PT Sky Aviation, maskapai penerbangan Indonesia, membeli 12 Sukhoi Superjet-100 seharga \$380 juta. Selain itu, Indonesia juga dilaporkan mempertimbangkan untuk membeli pesawat MS-21 untuk pasar sipil dan pesawat militeramfibi Be-200. Perusahaan Rusia juga tengah menggarap berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Pada Maret 2016, Russian Railways dilaporkan terlibat membangun sistem kereta api baru sepanjang 183 km di Kalimantan Timur, dengan proyek diperluas menjadi 575 km pada tahun 2017. Pada tahun 2016, diumumkan bahwa Rusia telah setuju untuk menginvestasikan US \$3 miliar untuk membangun pabrik aluminium baru di Kalimantan Barat (Yani, 2022).

Indonesia tetap perlu menjalankan politik luar negeri yang rasional dan moderat dengan mengandalkan prinsip-prinsip kerjasama internasional, saling menghormati kedaulatan nasional, dan non-interference. Diplomasi Indonesia dilaksanakan dengan menjauhi sikap konfrontatif dan melaksanakan peranan aktif dalam diplomasi preventif serta penyelesaian konflik, dalam hal ini citra Indonesia di mata masyarakat internasional perlu segera dipulihkan kembali karena berkaitan erat dengan kapasitas Indonesia untuk berperan aktif dalam percaturan internasional.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa kebijakan Indonesia dalam hukum politik luar negeri bebas aktif sudah sangat tepat, invasi Rusia ke Ukraina menjadi pendorong negara-negara ASEAN untuk bersatu dan tidak membuat ancaman bagi Negara manapun. Sejak menginvasi, Rusia juga

telah melanggar ketentuan hukum internasional yang sangat signifikan. Berbagai upaya dan mekanisme hukum tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan perang tersebut. Melihat dampak perang antara Rusia dan Ukraina terhadap politik global khususnya di Indonesia, peristiwa ini tidak berdampak terlalu signifikan mengingat Indonesia berteman baik dengan kedua negara tersebut. Meski begitu, Indonesia mempunyai momen untuk mengharmoniskan kembali kedua negara tersebut melalui momentum Group 20 (G20). Indonesia dapat berperan dalam mendamaikan ketegangan antara Rusia dan Ukraina mengingat Indonesia sebagai tuan rumah dalam acara G20, Indonesia dapat meminta bantuan kepada negara India dan Brazil dalam momen ini. Walaupun banyak mendapat kecaman dari negara-negara barat Indonesia harus mempunyai pendirian yang kuat.

Dengan demikian, perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia tentu berdampak terhadap stabilitas keamanan, politik dan ekonomi di kawasan, secara khusus yakni di Eropa. Persoalan pasokan energi dari Rusia ke Eropa tentu banyak dan akan terganggu oleh perang tersebut. Namun perang tersebut tidak melibatkan Ukraina dan Rusia secara *vis a vis*. Tetapi juga melibatkan beberapa negara besar semisal Amerika Serikat, Eropa bahkan Cina sebagai sekutu Rusia. Perang tersebut menjadi kompleks adanya. Hal ini bisa dilihat dari banyak korban dan waktu yang dibutuhkan oleh Rusia yang sampai hari belum bisa menguasai Kiev. Perang tersebut harus segera dihentikan dengan berbagai *win win solutions* yang kemudian bisa diterima oleh banyak pihak khususnya Ukraina dan Rusia. Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) harus memainkan peran yang nyata dalam peristiwa perang tersebut. Hanya saja PBB seolah tidak berdaya dengan kondisi tersebut. Secara sederhana juga seperti ada kepentingan dari Amerika Serikat atas terjadinya perang tersebut.

Sebagai negara berdaulat Indonesia harus mampu menyikapi peristiwa perang tersebut secara strategis dan politis. Maksudnya bahwa walaupun Rusia hari ini sedang perang dengan Ukraina, maka Indonesia bisa saja kemudian melakukan komunikasi tingkat tinggi dengan Rusia untuk membahas hal tersebut. Memang secara langsung Indonesia tidak terdampak atas perang yang terjadi. Namun disisi lain sebagai negara besar dan cinta damai, Indonesia harus mampu memainkan peran secara nyata. Indonesia punya hubungan yang baik terhadap kedua negara tersebut (Ukraina dan Rusia). Kondisi yang semacam ini tentu dimiliki oleh banyak negara di dunia saat ini. Maka dalam analisis sederhana penulis, Indonesia mampu memainkan peran secara *epic* dan strategis dan melakukan pendekatan *win win solutions* atas perang Ukraina dan Rusia.

Berdasarkan hasil uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak perang Rusia - Ukraina terhadap hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia menjadi lebih baik meskipun Indonesia mengecam terjadinya perang yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa bagi umat manusia. Selain itu, melihat dampak perang antara Rusia dan Ukraina terhadap politik global khususnya di Indonesia, ternyata tidak terlalu berdampak signifikan mengingat Indonesia sudah sejak lama menjalin hubungan persahabatan yang baik dengan kedua negara tersebut. Meski demikian, Indonesia mempunyai kesempatan dan peluang yang sangat bagus untuk mengharmoniskan kembali kedua negara tersebut melalui momentum penyelenggaraan KTT- G20.

Indonesia dapat berperan dalam mendamaikan ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina mengingat Indonesia sebagai tuan rumah dalam acara tersebut. Indonesia

memiliki kesempatan untuk mengundang kedua belah pihak dan menjadi mediator dalam dialog apabila diperlukan, demi tercapainya perdamaian atau paling tidak penghentian perang. Perang akan sangat merugikan selain jatuhnya korban jiwa secara kemanusiaan termasuk terganggunya stabilitas pasokan bahan pangan, energi termasuk pengaruh terhadap situasi politik global.

KESIMPULAN

Perang Rusia dan Ukraina adalah salah satu tragedy Internasional yang menjadi beban banyak Negara saat ini. Negara yang terdampak peristiwa perang tersebut tentu adalah Eropa. Pasokan energi eropa hampir separuh lebih berasal dari Rusia, sehingga perang tersebut tentu membuat kawasan Eropa dan sekitar menjadi tidak stabil. Dengan berdasarkan hasil pembahasan pada bab IV, dapat disimpulkan bahwa:

Latar belakang terjadinya perang antara Rusia - Ukraina pada November 2013 bermula ketika Presiden Ukraina pada saat itu Victor Yanukovich menolak untuk menandatangani perjanjian kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan lebih memilih untuk menerima bantuan dari Rusia berupa pinjaman sebesar 15 miliar dolar AS dan potongan harga gas dari Rusia sebesar 30 persen. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Massa anti pemerintah berhasil melengserkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa (UE) dan NATO yang membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Krimea di tahun 2014. Rusia juga mendukung separatist di Ukraina timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintah Ukraina. Isu serangan bergulir sejak November 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Moskow diyakini Barat memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya.

Dampak perang Rusia - Ukraina terhadap hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia menjadi lebih baik meskipun Indonesia mengecam terjadinya perang yang mengakibatkan korban jiwa bagi umat manusia. Selain itu, melihat dampak perang antara Rusia dan Ukraina terhadap politik global khususnya di Indonesia, peristiwa ini tidak berdampak signifikan mengingat Indonesia berteman baik dengan kedua negara tersebut. Di tengah konflik Rusia dan Ukraina, Indonesia punya kesempatan untuk memainkan perannya sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya. Indonesia dalam misi perdamaian dunia di Ukraina dan Rusia, menggunakan instrumen diplomasi yang mana memiliki tujuan untuk meredakan konflik dan mencapai perdamaian. Selain itu, Indonesia menggunakan instrumen Soft Power-nya yang berupa First Track Diplomacy sebagai sebuah upaya dalam mengawal dialog damai antara kedua negara. Sehingga Indonesia dapat menjamin tercapainya tujuan dan kepentingan yang dibawanya.

Daftar Pustaka

Buku

- Nasution, A.H. (2001). *Komite Penegak Keadilan dan Kebenaran*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Barston, R.P. (2013). *Modern Diplomacy*. New York: Pearson.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi Keempat, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid & Rianayati Kusmini). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Clausewitz, Carl Von. (2007). *On War* (Diterjemahkan oleh Michael Howard & Peter Paret). New York: Oxford University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga). Jakarta: Balai Pustaka.
- Kalshoven, Frits & Zegveld, Liesbeth. (2001). *Constraints on the Waging War*. Geneva: ICRC.
- Solis, Gary D. (2010). *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*. United Kingdom: Cambridge Press.
- Human Rights Watch. (2006). *Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity: A Topical Digest of the Case Law of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*. United States of America: Human Rights Watch.
- Ikbar, Yanuar. (2014). *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Morgenthau, Hans J. (1985). *Politics Among Nations* (6th ed.). New York: Alfred A. Knopf.
- Starke, J.G. (2008). *Pengantar Hukum Internasional* (Edisi Kesepuluh, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja). Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1978). *Sejarah Daerah Bali*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1980). *Hukum Internasional Humaniter Dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*.
- Notosusanto, Nugroho. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Permana, Angga Yudistira. (2015). *Perang Sipil Spanyol 1936-1939: Pergolakan Ideologi dan Intervensi Asing*. Bandung: Kentja Press.
- Haryomataram, KGPH. (2007). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminta. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Verri, Pietro. (1992). *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*. Geneva: ICRC.
- Syahmin, A.K. (1985). *Hukum Internasional Humaniter, Jilid 1: Bagian Umum*. Bandung: Armico.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. (2008). *Pengantar Ilmu Perang*. Jakarta: Pustaka Intermasa.
- Kartodirdjo, Sartono. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Sastrodiwiryo, Soegianto. (2011). *I Gusti Anglurah Panji Sakti*. Denpasar: Pustaka Bali Post.

Lindemann, Thomas. (2010). *Causes of War: The Struggle for Recognition*. Colchester, UK: ECPR Press.

Jurnal & Skripsi

Kretzmer, David. (2004). *The Supreme Court of Israel: Judicial Review During Armed Conflict*. *German Yearbook of International Law*, 392.

Zehfri, Faiza M. (2022). *Dampak Konflik Rusia–Ukraina terhadap Sistem Perdagangan Indonesia* (Skripsi).

Fransiskus, Atok. (2022). *Analisis Konflik Rusia dan Ukraina (Studi Kepustakaan Status Kepemilikan Krimea)*. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timo.

Tiara, Tulus, dkk. (2022). *Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia - Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power*. Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

Hakim, Burhan Ahmad. (2022). *Pengaruh Perang Rusia - Ukraina terhadap Stabilitas Hubungan Politik Indonesia dan Rusia*. Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia.

Sitanggang, Dyan F.D. (2013). *Pengrusakan Tempat Bersejarah dalam Perang Antarnegara sebagai Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional*. *Jurnal Lex et Societatis*.

Sarsito, Totok. (2009). *Perang dalam Tata Kehidupan Antarbangsa*. *Jurnal Komunikasi Massa*.